



ITJEN KEMENAG



TAHUN
TOLERANSI
INDONESIA
2022

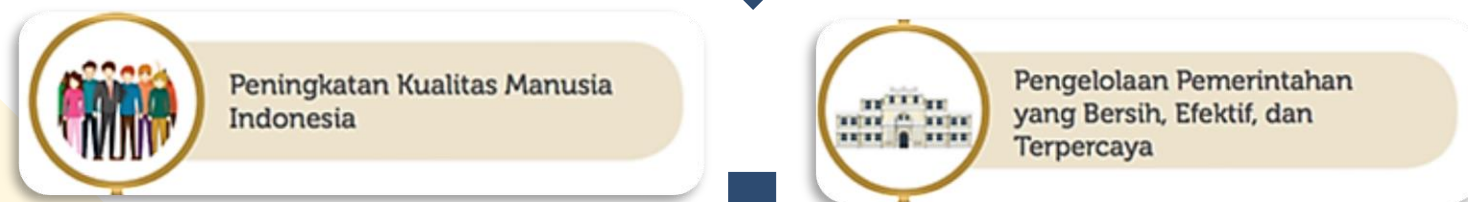
TRANSFORMASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA MENJADI ORGANISASI YANG ADAPTIF DAN *AGILE*

DR. FAISAL, SE, M.SI, CA, CSEP, QIA, CGCAE
Inspektur Jenderal Kemenag RI



Visi Misi Presiden 2020–2024 RPJMN 2020–2024

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong



7 AGENDA PEMBANGUNAN	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA 2020–2024

VISI

“Kementerian Agama yang profesional dan terpercaya dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”



Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal

TUJUAN 6	: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif
SASARAN STRATEGIS 12	: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA	: 1. Predikat opini laporan keuangan 2. Nilai reformasi birokrasi



SP.1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama

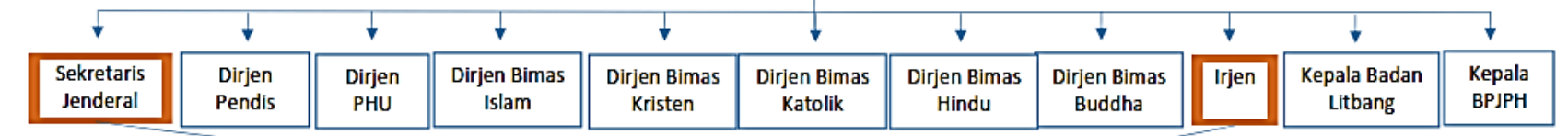
1. Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nilai maturitas SPIP
2. Batas materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran
3. Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif



SK.1 Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan pada satuan kerja pendidikan

1. Persentase laporan keuangan satuan kerja pendidikan telah disajikan sesuai dengan SAP
2. Nilai materialitas temuan keuangan pada satuan kerja pendidikan
3. Persentase hasil reviu pengendalian intern pelaporan keuangan yang ditindaklanjuti

TUJUAN 6	: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif
SASARAN STRATEGIS 12	: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA	: 1. Predikat opini laporan keuangan 2. Nilai reformasi birokrasi



SP.2 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian

1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Nilai Impelementasi sistem merit
4. Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
5. Persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82
6. Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)
7. Persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75
8. Persentase satuan kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB
9. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi
10. Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi
11. Nilai Kapabilitas APIP



SK.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko

1. Jumlah satuan kerja pendidikan yang di evaluasi pengendalian intern
2. Jumlah satuan kerja pendidikan yang di evaluasi manajemen risiko
3. Jumlah hasil pengawasan proyek strategis satuan kerja pendidikan

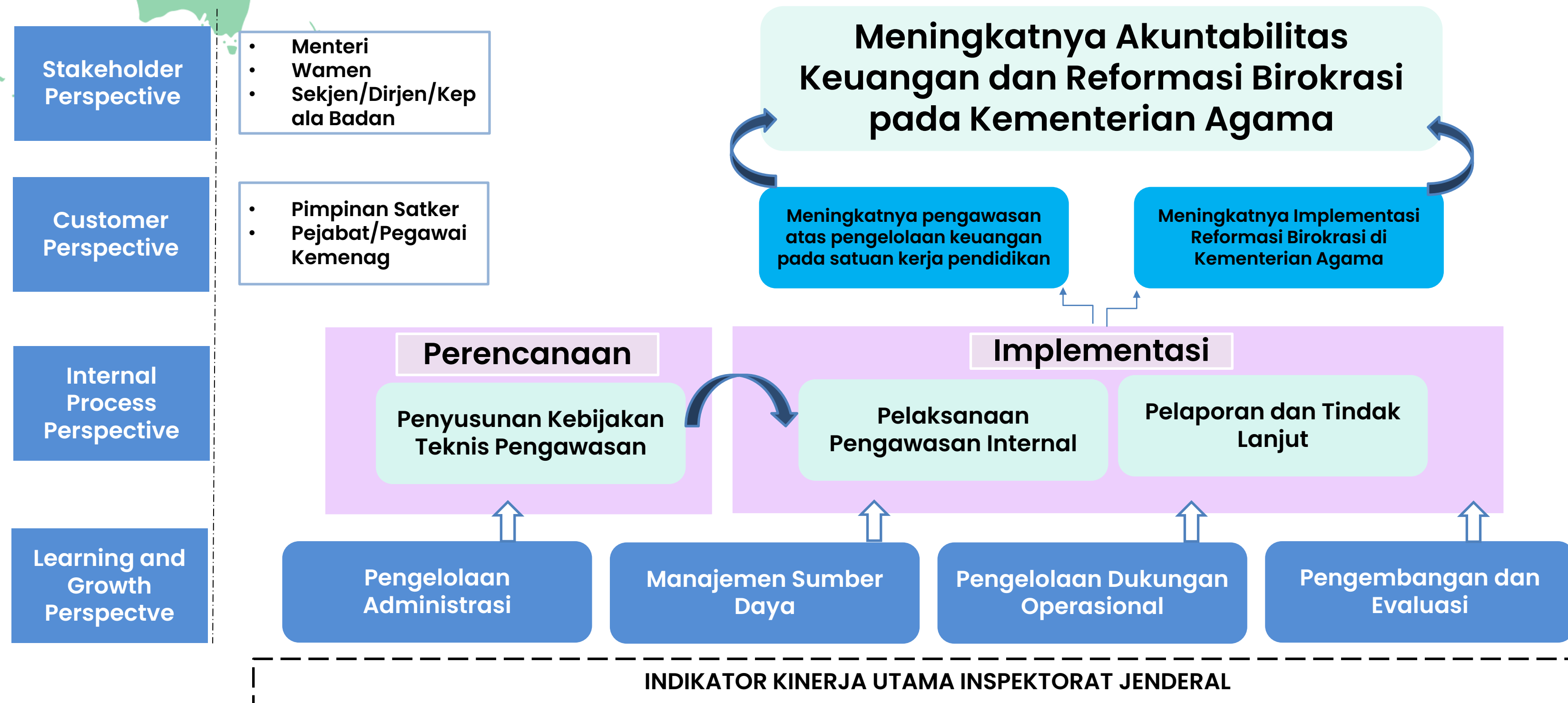
SK.2 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja pendidikan

1. umlah satuan kerja pendidikan yang dievaluasi PMPZI
2. Jumlah Satuan organisasi/satuan kerja pendidikan yang dilakukan audit kinerja
3. Jumlah satuan kerja pendidikan yang dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
4. Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja pendidikan

SK.3 Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan laporan whistle blowing system

1. Jumlah laporan hasil audit investigasi atas pengaduan masyarakat
2. Jumlah laporan whistle blowing system yang ditindaklanjuti
3. Jumlah laporan hasil audit dengan tujuan tertentu (tematik)

Peta Strategi Inspektorat Jenderal



Lingkup Pengawasan



4.713 Satuan Kerja

*Statistik Kementerian Agama

Eselon I	11
PTKN	72
MAN	802
MTsN	1.499
MIN	1.709
Kanwil	34
Kantor Kemenag Kota/Kabupaten	514
Balai Diklat Keagamaan	14
Balai Litbang Keagamaan	3
UPT Arsama Haji	10
KUA	5.963



236.008 ASN

PNS	228.627
PPPK	7.381

Guru Non ASN 241.971

Peserta Didik

Mahasiswa	1,104,190
Siswa MAN	1,465,445
Siswa MTsN	3,096,591
Siswa MIN	3,925,713



>250 Layanan Publik
(dari pusat sampai daerah)



258 Auditor

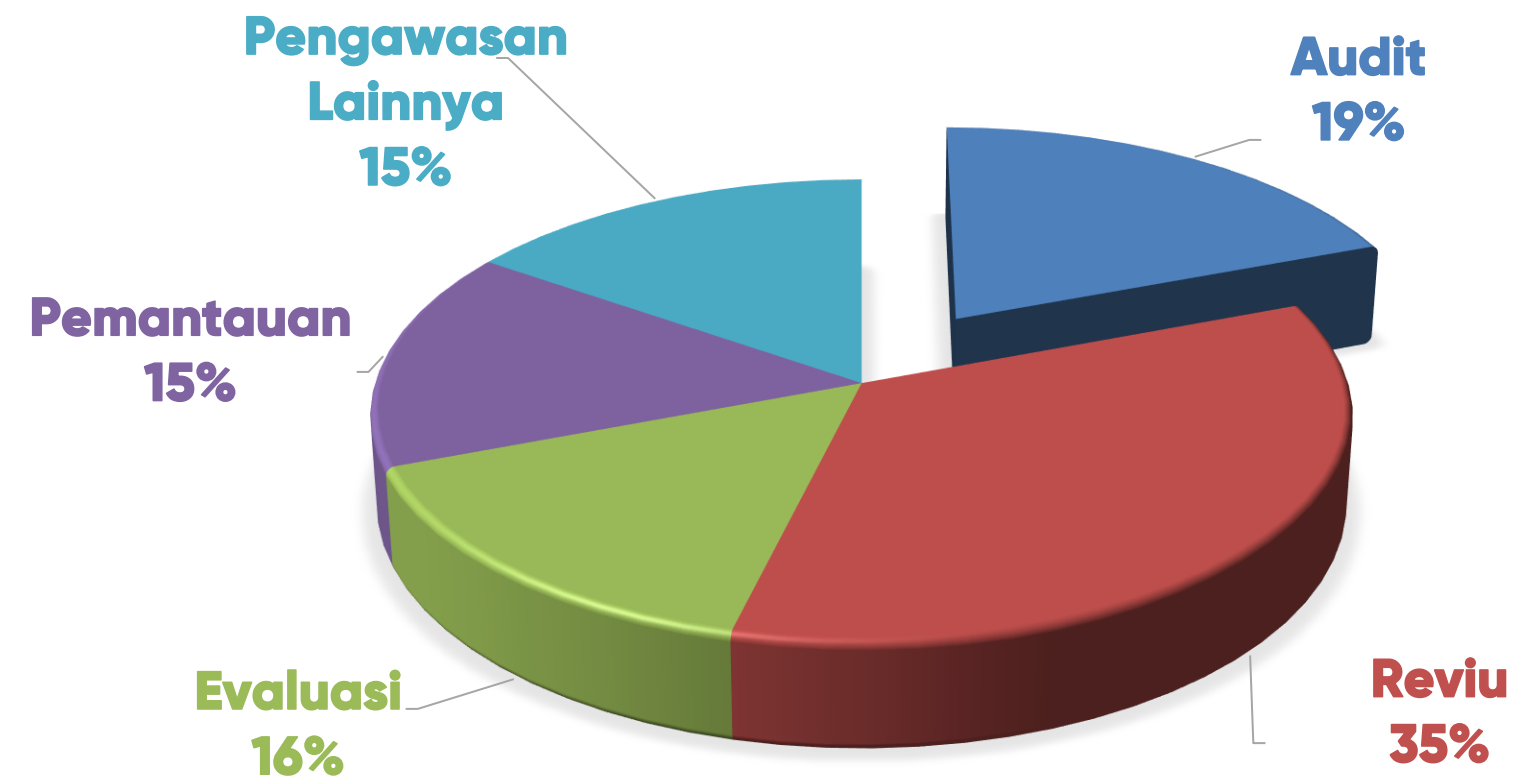
Kinerja Pengawasan

1.214 Satuan Kerja

52 Jenis Pengawasan

10 Jenis Audit
18 Jenis Reviu
8 Jenis Evaluasi
8 Jenis Pemantauan
8 Jenis Pengawasan Lainnya

**JENIS PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENAG RI**



Kinerja Pengawasan

Audit

No	Jenis Pengawasan	Cluster	Jumlah
1	Audit Kinerja	Madrasah	41
		PTKN	13
		Kanwil	3
		KKA	14
		Eselon 1	7
		Madrasah Unggulan	21
2	Audit BOS	Madrasah Negeri	74
		Madrasah Swasta	57
		Pondok Pesantren	5
3	Audit Syariah	Baznas	3
		LAZ	9
		Baitul Mal	1
		Yayasan	3
4	Audit Bantuan Sarpras	Madrasah	73
		PTKN/PTKS	36
		KKA	4
5	Audit / Reviu PNBP		45
		PNBP Asrama Haji Non UPT/Transit	13
6	Audit/Reviu BLU		17
7	Audit Program Bantuan Lembaga	PTKN	16
8	Audit Program Akreditasi, Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik		2
9	ATT	Eselon I	4
		Kanwil	2
		KKA	4
		Madrasah	3
		UPT Asrama Haji dan Transit	7
		PTKN	9
10	Investigasi	Madrasah	31
		PTKN	33
		KKA	61
		Kanwil	31
		Eselon 1	17
		UPT Asrama Haji	3

Reviu

No	Jenis Pengawasan	Cluster	Jumlah
1	Reviu RKA-K/L		19
2	Reviu LK	Eselon 1	11
		Kanwil	30
		Kementerian	4
		PTKN	7
3	Reviu SBSN		88
4	Reviu PIPK	Eselon 1	11
		Kanwil	14
		Madrasah	3
5	Reviu BMN		56
6	Reviu KDP		24
7	Reviu Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Eselon 1	1
		Kanwil	1
		Madrasah	1
8	Reviu Sarana Prasarana Lembaga		4
9	Reviu dan Verifikasi Bantuan Dana Pendidikan		36
10	Reviu Anggaran Optimalisasi Pemanfaatan anggaran melalui Revisi Anggaran Eselon 1		1
11	Reviu Hutang Pihak Ketiga TA 2020 & 2021	PTKIN	1
12	Reviu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 UKPBJ	Eselon 1	1
13	Reviu PMPRB Kemenag dan Eselon I	Eselon 1	15
		Kementerian	1
14	Reviu Refocusing Perjalanan Dinas Tahun 2022	Eselon I	6
15	Reviu Tambahan Automatic Adjustment TA 2022	Kementerian	1
16	Reviu Tunggakan Tukin	PTKN	1
		KKA	1
17	Reviu Tunggakan Belanja	PTKN	1
18	Reviu Revisi Anggaran	Eselon 1	2
		PTKN	3

Evaluasi

No	Jenis Pengawasan	Cluster	Jumlah
1	Evaluasi SAKIP		118
2	Evaluasi PIP	Madrasah	82
3	Evaluasi KIP	PTKN	26
		PTKS	76
4	Evaluasi Program Kemandirian Pondok Pesantren	Pontren	32
5	Evaluasi Program Akreditasi, Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik		48
6	Evaluasi Perizinan Lembaga		21
7	Evaluasi Program Model dan Kurikulum Pembelajaran (E-Learning)		16
8	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama/ Non PNS		4

Pemantauan

No	Jenis Pengawasan	Cluster	Jumlah
1	Pemantauan ZI WBK WBBM	Eselon 1	6
		PTKN	1
		Kanwil	2
		KKA	7
		Madrasah	5
2	Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Kanwil	5
		PTKN	16
3	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Lembaga Pendidikan		11
4	Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama	Eselon I	1
		PTKN	3
		Kanwil	3
		KKA	2
		BDK	3
5	Pemantauan Transformasi Digital	Kementerian	1
		Eselon I	11
6	Pemantauan Peta Wilayah	Kanwil	4
7	Pemantauan Revitalisasi KUA	KUA	36
8	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sarpras		14

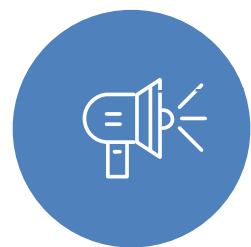
Pengawasan Lainnya

No	Jenis Pengawasan	Cluster	Jumlah
1	Koordinasi dalam Pembuatan Instrumen		13
2	Klarifikasi Dumas	Eselon 1	5
3	Koordinasi dan Pengumpulan Data APP 2023	Kementerian an/Lemba ga Lain	4
		Eselon I	5
4	Koordinasi dan Pengumpulan Data Audit TI	Kementerian an/Lemba ga Lain	4
		PTKN	1
5	Pendampingan Seleksi JPT Pratama-Makalah	Eselon I	1
		PTKN	3
6	Pendampingan Seleksi JPT Pratama-Asesmen Kompetensi	PTKN	10
7	Pendampingan Seleksi JPT Madya-Makalah	PTKN	1
8	Pendampingan Seleksi JPT Madya - Asesmen Kompetensi	PTKN	1

PERMASALAHAN PADA KANWIL/KANKEMENAG/MADRASAH

Penyusunan perencanaan belum sejalan dengan Renstra

Satuan Kerja:
Kanwil
Kankemenag
Madrasah



Perpustakaan belum dikelola secara memadai diantaranya belum SOP, penetapan denda.

Satuan Kerja:
Madrasah



Penggunaan/Keuangan:

- Terdapat kesalahan penggunaan Kode Mata Anggaran Keuangan (MAK).
- Terdapat penggunaan anggaran belum dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.
- Terdapat penggunaan anggaran yang melebihi/belum sesuai SBM, seperti honor, perjadin, fullboard.
- Terdapat penganggaran untuk kegiatan yang tidak menunjang ketercapaian tujuan/sasaran dan target dalam rencana/program kerja.
- Kelebihan pencairan kegiatan belum dikembalikan ke kas Negara.



Satuan Kerja:
Kanwil
Kankemenag
Madrasah

Kepegawaian:

- Kedisiplinan pegawai rendah.
- Anjab/ABK belum dibuat.

Satker:
Kanwil
Kankemenag
Madrasah



Laporan Kinerja:

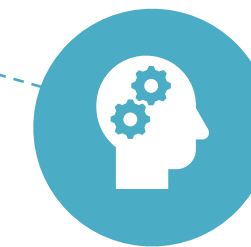
- Beberapa satker belum menyusun Laporan Kinerja.
- Beberapa sudah menyusun Laporan Kinerja namun belum sesuai dengan ketentuan

Satuan Kerja:
Kanwil
Kankemenag
Madrasah



Pengelolaan BMN:

- BMN belum dikelola secara memadai mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan penghapusan.
- Seluruh belanja modal baik yang dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung maupun penunjukkan langsung tidak dilaksanakan melalui e-purchasing.
- HPS belum dibuat.
- Hibah belum disahkan.
- Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.



Satuan Kerja:
Kanwil
Kankemenag
Madrasah



PERMASALAHAN PADA PERGURUAN TINGGI

- Instrumen penilaian pembelajaran tidak seragam untuk masing-masing program studi.
- Evaluasi kinerja dosen belum berjalan periodik baik oleh mahasiswa, dosen sendiri (*self assesment*), dan penilai (pimpinan jurusan/prodi).
- Penilaian beban kerja dosen belum terdokumendasikan dengan baik.
- Masih rendahnya kualitas pendidik.

AKADEMIK

- Masih rendahnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri yang dilakukan oleh dosen.
- Belum ada upaya sinergisitas antara penelitian dan hasil penelitian yang diimplementasikan pada program Perguruan Tinggi.
- *Link and match* antara pendidikan tinggi dan kebutuhan akan sumberdaya manusia di lapangan kerja.

- Penyusunan perencanaan belum sejalan dengan Renstra
- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Tertib
- Belum memadainya fasilitas pendidikan.
 - BMN belum dikelola secara memadai mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan penghapusan.
- Penggunaan anggaran belum dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.

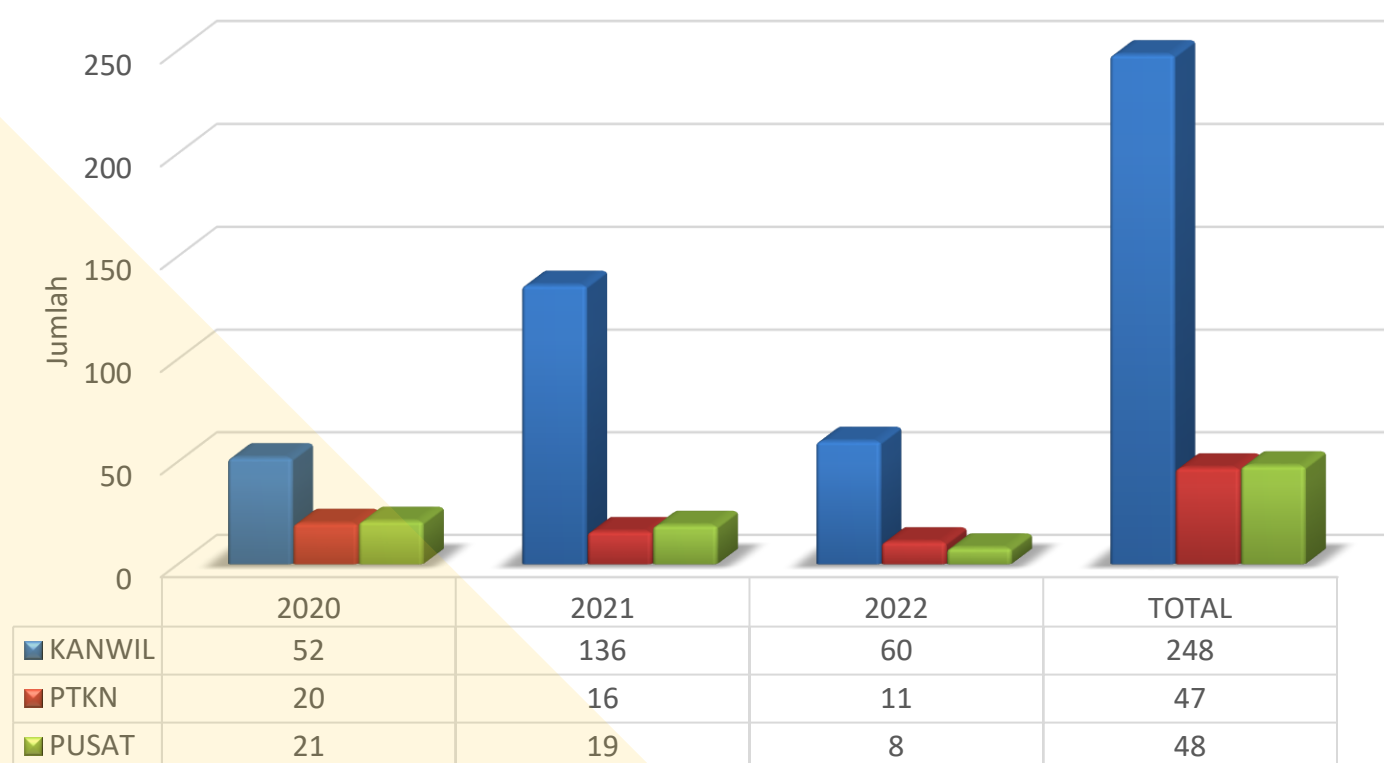
NON AKADEMIK

- Penggunaan anggaran melebihi/belum sesuai SBM, seperti honor, perjadiin, fullboard.
 - SOP layanan belum ditetapkan
- Hasil pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI) belum ditindaklanjuti oleh manajemen
- Perpustakaan belum dikelola secara memadai
 - Laporan kinerja belum mengungkap analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

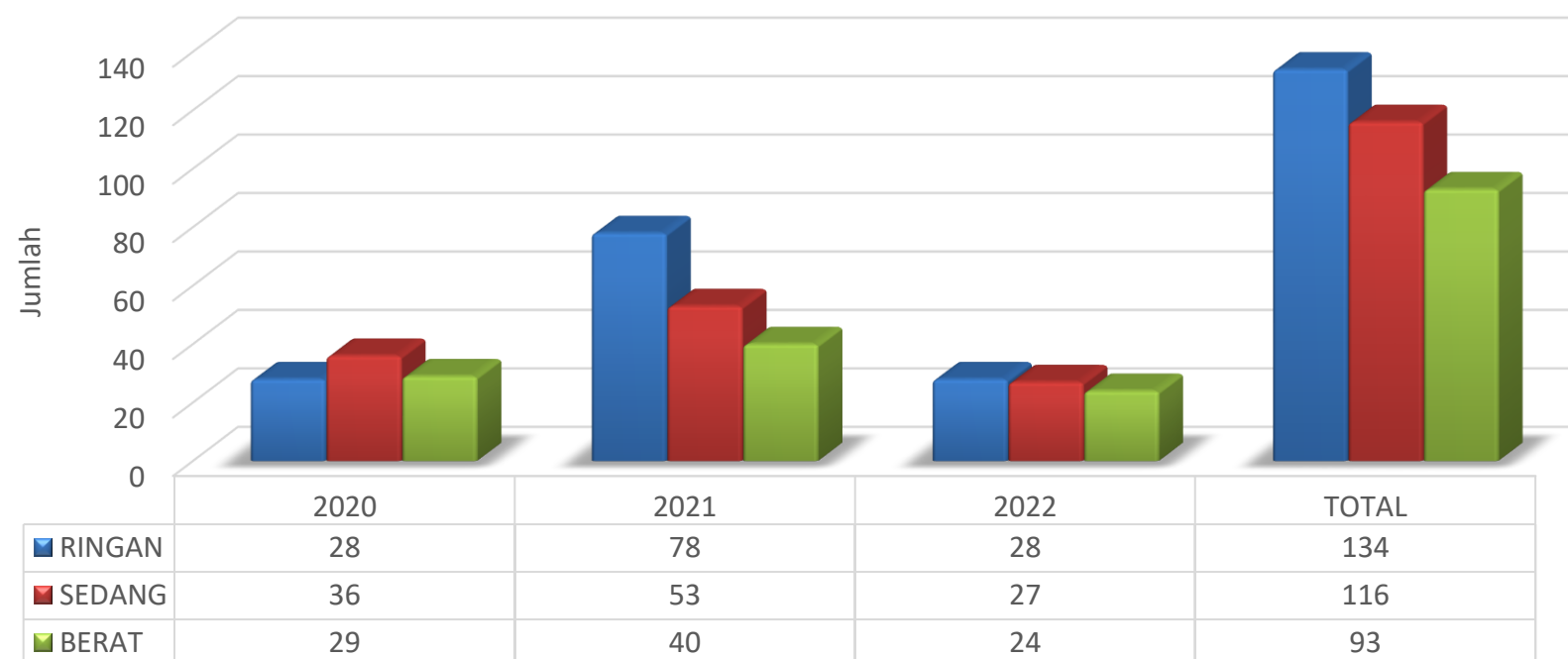


Rekomendasi Hukuman Disiplin Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d. November 2022

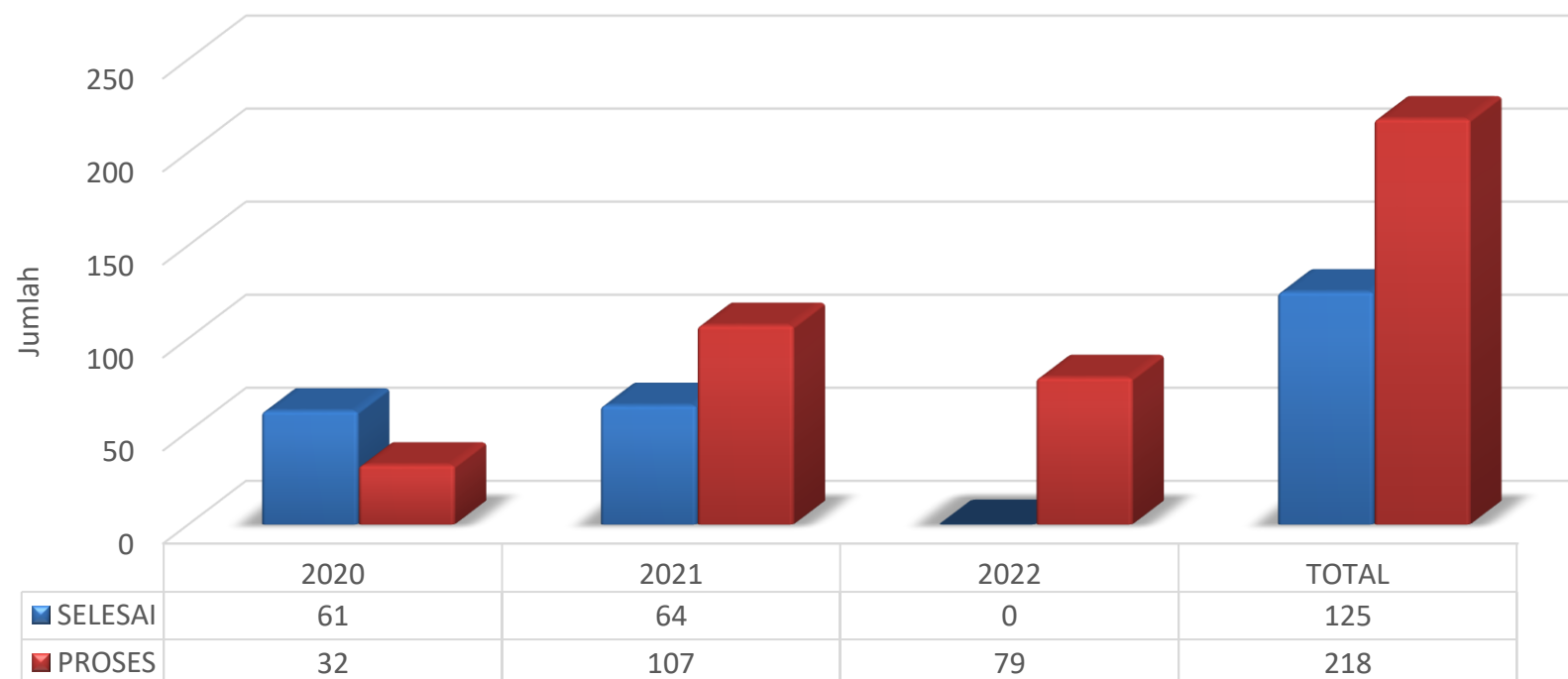
Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan Tingkat



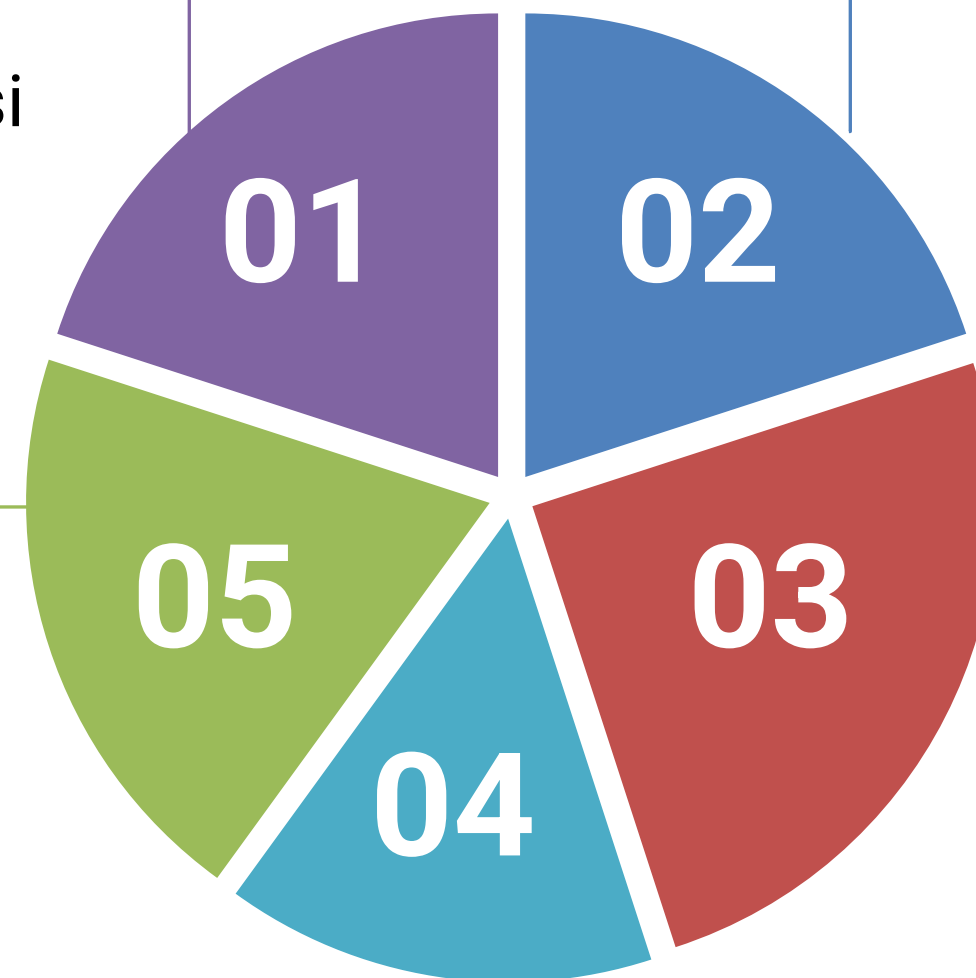
Berdasarkan Status



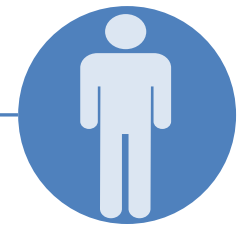
JENIS KASUS YANG DITANGANI OLEH ITJEN YANG MENGAKIBATKAN TERBITNYA HUKUMAN DISIPLIN



- Pungutan
- Penerimaan Gratifikasi

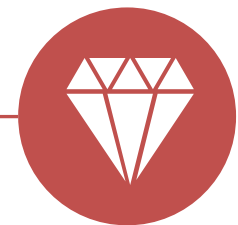


- Indisipliner Kehadiran
- Netralitas PNS
- Ujaran Kebencian
- Paham Radikalisme



- Penyalahgunaan Wewenang
- Penyelewengan Anggaran

- PNBPNR Tidak Sesuai Aturan
- Perselingkuhan, Pernikahan Kedua Tanpa Izin, Pernikahan Menjadi Istri Kedua, Perceraian Tanpa Izin



- Pengadaan Barjas Tidak Sesuai Prosedur

Akar Masalah

...

1

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang tidak kondusif dan komunikatif

2

Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian belum memadai

3

Keuangan, Aset, dan PNBP

Pengelolaan keuangan, aset, dan PNBP belum tertib

4

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang tidak terkendali

5

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan tidak transparan

6

Perilaku Tak Terpuji

Perilaku yang tidak sesuai nilai Lembaga pendidikan

7

Ketentuan Belum Ada

Juknis Tidak Ada/Tidak Jelas/Berlebihan



ITJEN KEMENAG



TAHUN
TOLERANSI
INDONESIA
2022

Paradigma Baru Pengawasan

STRATEGIC PARTNER

Institute of Internal Auditor (IIA, 2020)

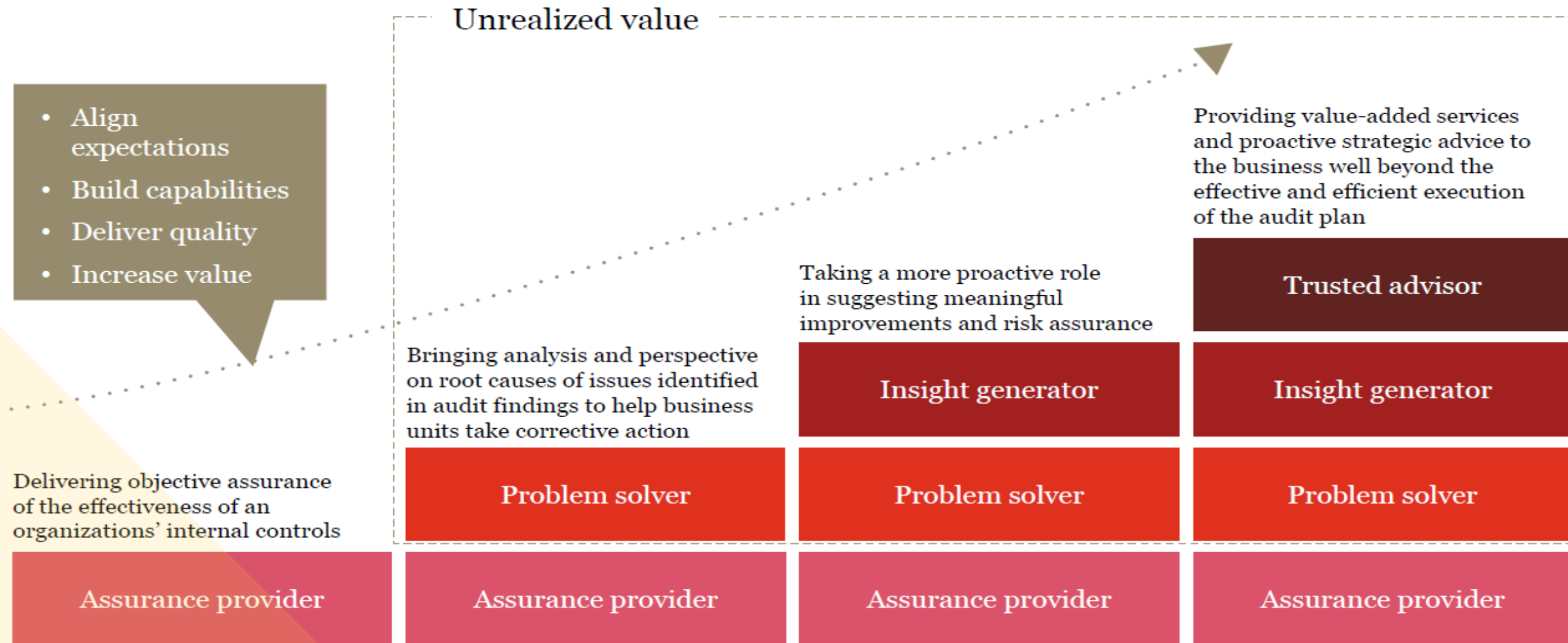
Peran APIP sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan

***EARLY WARNING
SYSTEM***

***QUALITY
ASSURANCE***

***TRUSTED ADVISOR
(CONSULTING SERVICES)***

Internal Audit Maturity Model



Prinsip dalam Melakukan Transformasi Pengawasan



Kecepatan

Pengawasan intern tidak boleh memperlambat pelaksanaan program/kegiatan manajemen



Kolaborasi

Kolaborasi dengan APH, APIP lain dan Pemeriksa Eksternal perlu dibangun dan terus ditingkatkan



Orientasi Masyarakat

Kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan



Preventif

Pengawasan intern fokus pada upaya pencegahan sebelum permasalahan terjadi

“Pengawasan intern harus dapat memberikan saran dan perbaikan serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan”

Aksi Perbaikan

...

1

Penguatan pengendalian internal di PTKN dan satuan kerja

4

Peningkatan peran konsultan yang lebih proporsional

2

Pengawasan akan difokuskan ke area layanan publik

5

Reward punishment dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan

3

Perubahan metode pengawasan dari konvensional menuju *e-audit*/berbasis elektronik



“

“Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan, tetapi kalau ada yang masih *memandel*, ada niat untuk korupsi, ada *mens rea* (niat jahat), silakan digigit dengan keras.

**UANG NEGARA HARUS
DISELAMATKAN,
KEPERCAYAAN RAKYAT
HARUS TERUS
KITA JAGA.”**

Presiden Jokowi
Senin, 15 Juni 2020

Arahan Presiden

“

“Yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Pengawasan harus menjamin tidak ada se rupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan termasuk terhadap kualitas perencanaan. Jangan sampai ada lagi program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya dan tidak jelas sasarannya. Akurasi data seperti penyaluran bantuan jangan sampai tumpang tindih dan tidak tepat sasaran,”

(Arahan Presiden pada Rakorwasin 2021)





Arahan Presiden

“

“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,”

(Arahan Presiden Pada Rakorwasin 2022)



ITJEN KEMENAG



TAHUN
TOLERANSI
INDONESIA
2022



Faisal

Inspektur Jenderal
Kemenag RI

“

Terima Kasih